

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Setiap usaha yang telah berdiri diharapkan mampu menjaga kestabilannya dan tetap beroperasi dalam jangka waktu yang lama. Pertumbuhan dunia usaha bisnis saat ini mengharuskan setiap perusahaan mengupayakan daya saing dalam bidang operasi. Persaingan yang ketat antar perusahaan dan didukung oleh kondisi perekonomian negara yang cenderung tidak pasti, sehingga perusahaan tentu saja memerlukan dana tambahan untuk menunjang segala aktivitas operasionalnya.

Munculnya tambahan dana yang diperoleh dari pihak ketiga berupa utang dan modal saham. Sehingga tambahan dana tersebut akan memunculkan suatu bentuk pertanggungjawaban perusahaan terhadap kreditur dan para pemegang saham. Dengan menyajikan laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban perusahaan terhadap kreditur dan para pemegang saham. Menurut Standar Akuntan laporan keuangan merupakan bagian proses pelaporan keuangan yang lengkap meliputi neraca, laporan laba rugi, adanya laporan perubahan posisi keuangan ( arus kas, atau arus dana, catatan dan laporan lain)

Laporan keuangan akan dijadikan untuk melihat indikasi kondisi penentu masa depan dari perusahaan tersebut. Adapun tujuan laporan keuangan menurut Standar Akuntansi Keuangan adalah menyediakan informasi terkait posisi keuangan, kinerja dan perubahan posisi keuangan dalam sebuah perusahaan. Laporan keuangan tersebut akan digunakan oleh pengguna laporan keuangan

(kreditur, pemegang saham) digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan serta menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber-sumber daya yang dipercayakan para pemegang saham pada perusahaan. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk menjaga kepercayaan pemegang saham dengan menyajikan laporan keuangan yang baik dan tidak menyimpang pada aturan yang telah berlaku.

Terkadang para pemberi dana (investor) hanya terfokus pada laba yang dihasilkan oleh manajemen harus memenuhi target yang diharapkan dan mengabaikan proses terciptanya laba itu sendiri sehingga secara tidak langsung memberikan tekanan pada manajemen perusahaan untuk melakukan berbagai cara untuk mencapai target yang diharapkan mereka harapkan. Manajemen perusahaan dibebaskan dalam menentukan kebijakan penggunaan metode akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan untuk mencapai tujuan yang diinginkan perusahaan. Hal ini mendorong manajemen untuk melakukan beberapa usaha atau tindakan yang disebut dengan manajemen laba. Menurut Fischer dan Rosenzweig (1995), manajemen laba adalah tindakan manajer yang menaikkan (menurunkan) laba yang dilaporkan dari unit yang tanggungjawabnya namun tidak memiliki hubungan dengan kenaikan atau penurunan profitabilitas perusahaan dalam jangka Panjang. Sedangkan menurut Copeland (1968), manajemen laba merupakan usaha manajemen untuk memaksimalkan atau meminimumkan laba termasuk perataan laba sesuai dengan keinginan manajer. Beberapa pihak memandang tindakan manajemen laba dari sudut yang berbeda, tindakan kecurangan (*fraud*). Manajemen laba dikatakan sebagai kecurangan karena pada dasarnya manajemen laba merupakan pelaku *oportunis*

seorang manajer untuk mempermainkan angka-angka yang terdapat dalam laporan keuangan sesuai dengan tujuan ingin dicapai.

Tindakan manajemen laba ini telah memunculkan beberapa kasus dalam pelaporan akuntansi perusahaan di dunia, salah satu skandal yang terjadi yaitu pada supermarket Tesco. Tesco merupakan kelompok ritel terbesar ketiga setelah Wal-Mart dan Carrefour di UK yang terlibat skandal akuntansi di tahun 2014, Dimana pada tanggal 22 September, ketika perusahaan tersebut mengakui bahwa masalah yang ditemukan dalam bisnis makanannya di Inggris berarti kemungkinan besar perusahaan tersebut melebih-lebihkan laba sebesar £250 juta Rogberg, Bush, dan Scouler – mantan kepala keuangan, direktur pelaksana, dan kepala komersial makanan – menghadapi kasus pengadilan yang panjang yang akhirnya dimulai pada tahun 2017. Ketiganya dituduh terlibat dalam rencana “kejahatan kerah putih” dan didakwa melakukan penipuan dengan menyalahgunakan posisi dan akuntansi palsu. skandal ini terjadi akibat mendapat tekanan dari pesaingnya yang menjual produk diskon.

Hingga saat ini manajemen laba masih menjadi fenomena umum terjadi dikalangan perusahaan. Hasil survei yang dilakukan oleh *Association of Certified Fraud Examiners* terdapat 23 kasus *fraud* di Indonesia, Sehingga menjadikan Indonesia berada di urutan ke-4 sebagai negara dengan jumlah kasus *fraud* terbanyak di Asia Pasifik (Christian *et al.*, 2023) . Berdasarkan riset yang telah dilakukan tim CNBC ada beberapa perusahaan yang tersandung kasus terkait dugaan manajemen laba antara lain (1) PT KAI tahun 2006, (2) PT Kimia Farma Tbk tahun 2001, (3) PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk tahun 2019, (4) PT Asuransi Jiwasraya tahun 2018, (5) PT Indofarma Tbk tahun 2001, (6) PT

Hanson International Tbk tahun 2016 dan (7) PT Envy Technologies Indonesia Tbk pada tahun 2019 (Sandria, 2021). Adanya manajemen laba, akhirnya akan berdampak pada biasanya informasi yang terdapat dalam laporan keuangan perusahaan yang mempengaruhi pengambilan keputusan investor ataupun pihak internal lain yang bergantung pada informasi yang tertera dalam laporan keuangan.

Terdapat banyak faktor yang menjadi alasan manajer dalam melakukan manajemen laba, diantaranya adalah profitabilitas, *leverage*, *mekanisme good corporate governance*, ukuran perusahaan dan komite audit. Ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan yang ditunjukkan oleh total aktiva, jumlah penjualan, rata-rata total penjualan, dan rata-rata total aktiva. Perusahaan yang besar mendapat perhatian lebih dari pihak *eksternal* seperti, investor, kreditur maupun pemerintah. Oleh karena itu perusahaan yang berukuran besar lebih berhati-hati dalam melaporkan kondisi keuangannya. Penelitian yang dilakukan oleh Lidiawati (2022) menyatakan bahwa terdapat pengaruh ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap manajemen laba sedangkan menurut Violinna dan Zubaidi (2022), Sari dan Susilowati (2022) hasil penelitiannya menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.

Keterikatan antara tingkat *leverage* dengan manajemen laba terletak ketika tingginya tingkat rasio *leverage* akan menjadi pemicu perusahaan melakukan manajemen laba dengan cara menaikkan laba agar dapat menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi perjanjian hutang yang ada. Fathihani dan Wijayanti, (2022) , Angelita dan Mungniyati (2023) telah melakukan penelitian

mengenai *leverage* dan memperoleh hasil bahwa *leverage* berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Prajitno dan Vionita (2020) dan Angelita and Mungniyati (2023) menyatakan *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba.

Profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan dalam pengelolaan asset untuk menghasilkan laba. Pada umumnya nilai profitabilitas suatu perusahaan dapat digunakan sebagai indikator untuk mengukur kinerja suatu perusahaan. Keterkaitan antara profitabilitas dengan manajemen adalah ketika profitabilitas yang diperoleh perusahaan kecil pada periode waktu tertentu akan memicu perusahaan untuk melakukan manajemen laba dengan cara meningkatkan pendapatan yang diperoleh sehingga akan memperlihatkan saham dan mempertahankan investor yang ada.

Penelitian yang dilakukan oleh Angelita dan Mungniyati (2023) dan Sakdiyah (2020) menyatakan bahwa tingkat profitabilitas berpengaruh positif terhadap manajemen laba sedangkan menurut penelitian Agustina dan Suryani (2018) menyatakan profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Rasio *leverage* merupakan rasio yang terdapat dalam laporan keuangan yang dapat mengetahui seberapa besar perusahaan dibiayai oleh hutang dengan kemampuan perusahaan oleh modal. Semakin tinggi rasio *leverage* perusahaan menggambarkan bahwa perusahaan mengalami kesulitan dalam menghadapi perjanjian hutang.

Penyatuan kepentingan anatar pihak manajer seringkali menimbulkan masalah keagenan atau agensi konflik. Menurut teori keagenan untuk mengatasi masalah ketidakselarasan kepentingan antara *participal* dan *agent* dapat

dilakukan melalui pengolahan perusahaan yang baik. Mekanisme *corporate governance* memiliki kemampuan pengendalian yang dapat mensejajarkan perbedaan kepentingan antara *partisipal* dan *agent*, sehingga dapat menghasilkan suatu laporan keuangan yang memiliki kandungan informasi laba yang berkualitas (Boediono, 2005).

Kepemilikan manajerial dianggap sebagai salah satu faktor yang berpengaruh terhadap manajemen laba yang dilakukan manajer. kepemilikan saham oleh manajemen perusahaan dapat menyetrakan kepentingan pemegang saham dengan kepentingan manajer sehingga konflik kepentingan antara pemegang saham dan manajer dapat dikurangi. Secara teoritis ketika kepemilikan saham oleh manajerial tinggi maka kemungkinan terjadinya perilaku *opportunistic manjer* (manajemen laba) akan menurun. Hasil penelitian dari Arlita, *et al.* (2020) menemukan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen laba. Menurut Asyati dan Farida (2020) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial memiliki pengaruh *negative* terhadap manajemen laba, sedangkan menurut Prajitno dan Vionita (2020) menunjukkan kepemilikan manajerial tidak mempengaruhi manajemen laba.

Selain kepemilikan manajerial, dewan komisaris independen juga mempengaruhi manajemen laba di sutau perusahaan. Melalui peran dewan komisaris dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap operasional perusahaan oleh pihak manjemen, kompesisi dewan komisaris dapat memberikan kontribusi yang efektif terhadap hasil dari proses penyusunan laporan keuangan yang berkualitas atau kemungkinan terhindar dari kecurangan laporan keuangan. Hasil penelitian dari Arlita, *et al.*, (2020) dan Suheny (2020)

menunjukkan adanya pengaruh positif dan signifikan dewan komisaris independent terhadap manajemen laba.

Hubungan antara kepemilikan institusional dengan manajemen laba yaitu tingkat kepemilikan yang tinggi oleh institusi dalam suatu perusahaan akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar yang dilakukan oleh investor institusional sehingga akan dapat mengontrol manajer untuk tidak melakukan perbuatan yang tidak sejalan dengan kepentingan pemegang saham yang pada akhirnya akan mengurangi *agency cost*. Penelitian dari Suheny (2020) dan Arlita, *et al.*, (2020) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negative dan signifikan terhadap praktik manajemen laba.

Faktor terakhir yang mempengaruhi manajemen laba yaitu komite audit. Keberadaan komite audit yang cukup independen dapat membantu dalam mengurangi aktivitas manajemen laba. Semakin tinggi presentase anggota independent maka semakin kecil manajemen laba yang dilakukan perusahaan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Susilowati (2022) menyatakan komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen laba sedangkan menurut penelitian dari Lidiawati (2022) menyatakan komite audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba.

Pada penelitian sebelumnya, bahasan studi tentang manajemen laba telah banyak dilakukan dari berbagai sektor perusahaan. Namun terdapat perbedaan hasil yang ditunjukkan oleh penelitian terdahulu. Pada penelitian Sakdiyah (2020) menunjukkan bahwa umur perusahaan dan profitabilitas berpengaruh positif terhadap manajemen laba dan ukuran perusahaan, *leverage* berpengaruh negative tidak signifikan terhadap manajemen laba. Sedangkan pada penelitian

Suheny (2020) menunjukkan bahwa *corporate governance* yang di proksikan dengan kepemilikan manajerial, ukuran dewan, komposisi dewan, komite audit tidak berpengaruh terhadap manajemen laba sedangkan proksi kepemilikan institusional berpengaruh terhadap manajemen laba, ukuran perusahaan berpengaruh negative terhadap manajemen laba, leverage berpengaruh positif terhadap manajemen laba, kualitas audit berpengaruh yang diproksikan dalam KAP BIG4 dan NON BIG4 KAP berpengaruh negative terhadap manajemen laba dan pada penelitian yang dilakukan Sari dan Susilowati (2022) menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen laba. Selain itu, komite audit ditemukan berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen laba namun pada ukuran perusahaan, profitabilitas dan kualitas audit tidak ditemukan mempunyai pengaruh terhadap manajemen laba.

Berdasarkan uraian di atas terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi manajemen laba. Namun hasil penelitian sebelumnya masih menunjukkan adanya ketidak konsistenan hasil penelitian. Maka penulis tertarik untuk menguji kembali pengaruh ukuran perusahaan, *leverage*, profitabilitas, *mekanisme good corporate governance* dan komite audit terhadap manajemen laba.

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

- 1) Apakah ukuran perusahaan berpengaruh pada manajemen laba perusahaan ?
- 2) Apakah *leverage* berpengaruh pada manajemen laba perusahaan ?
- 3) Apakah profitabilitas berpengaruh pada manajemen laba perusahaan ?

- 4) Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh pada manajemen laba perusahaan ?
- 5) Apakah dewan komisaris independen berpengaruh pada manajemen laba perusahaan ?
- 6) Apakah kepemilikan institusional berpengaruh pada manajemen laba perusahaan ?
- 7) Apakah komite audit berpengaruh pada manajemen laba perusahaan ?

### 1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

- 1) Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh ukuran perusahaan terhadap manajemen laba
- 2) Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh *leverage* terhadap manajemen laba perusahaan
- 3) Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh profitabilitas terhadap manajemen laba perusahaan
- 4) Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh kepemilikan manajerial terhadap manajemen laba perusahaan
- 5) Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh dewan komisaris independent terhadap manajemen laba perusahaan
- 6) Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh kepemilikan Institusional terhadap manajemen laba perusahaan

- 7) Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh komite audit terhadap manajemen laba perusahaan

#### 1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan ini diharapkan mampu memberi manfaat bagi pihak yang berkepentingan, antara lain yaitu:

- 1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti sejenis untuk mengembangkan ilmu pengetahuan bagi perkembangan dan kemajuan dunia pendidikan khususnya dibidang pengauditan Manfaat Praktis

- 2) Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan evaluasi bagi para pemegang saham dalam mempertimbangkan keputusan yang berkaitan dengan dengan penanaman modal dalam suatu perusahaan. Terutama dalam menilai kualitas manajemen laba perusahaan tersebut. Diharapkan para investor benar benar melakukan analisis yang mendalam mengenai keadaan perusahaan, karena dikhawatirkan tindakan manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan menyimpang dari hal wajar sehingga dikemudian hari dapat membahayakan investasi yang ditanam investor. Bagi universitas, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan ilmu tambahan dalam meningkatkan pemahaman mengenai manajemen laba.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Landasan Teori

##### 2.1.1 Teori Agensi

Teori agensi (*Agency Theory*) menurut Fathur Izani dan Kuntadi (2022) adalah teori yang membahas mengenai hubungan atau kontrak antara *principal* dan *agent*, dimana *agent* (manajemen) bertanggung jawab secara moral dalam menjalankan kepentingan *principal* untuk mengoptimalkan keuntungan dan *principal* sebagai pihak yang mempekerjakan *agent* agar melakukan tugas untuk kepentingan *principal* akan memberikan imbalan atau kompensasi sesuai dengan kontrak yang sudah disepakati. Sedangkan menurut Sari dan Susilowati (2022), teori yang membahas hubungan keagenan sebagai kontrak, dimana satu atau beberapa orang (*principal*) mempekerjakan orang lain (*agent*) untuk melaksanakan sejumlah jasa dan mendelegasikan wewenang untuk mengambil keputusan kepada agen tersebut merupakan definisi dari teori agensi. Definisi diatas dapat disimpulkan bahwa definisi teori agensi adalah hubungan antara *principal* (pemilik/pemegang saham) dan *agent* (manajer). Di dalam hubungan keagenan tersebut terdapat suatu kontrak dimana pihak *principal* memberi wewenang kepada *agent* untuk mengelola usahanya dan membuat keputusan yang terbaik bagi *principal*.

Teori agensi mengasumsikan bahwa semua individu bertindak untuk kepentingan masing masing. *Agent* diasumsikan akan menerima kepuasan

tidak hanya dari kompensasi keuangan tetapi juga dari tambahan yang terlihat dalam hubungan suatu agensi, seperti waktu luang yang lebih, kondisi kerja yang menarik dan jam kerja yang *fleksibel*. *Principal* diasumsikan hanya tertarik pada pengembalian keuangan yang diperoleh dari investasi mereka di perusahaan tersebut. Hubungan agensi antara pemilik dan pengelola perusahaan ini seharusnya menghasilkan hubungan *symbiosis* mutualisme yang dapat menguntungkan semua pihak khususnya jika setiap pihak menjalankan hak dan kewajibannya secara bertanggung jawab. Justru sebaliknya, muncul permasalahan agensi antara pemilik saham dengan pengelola perusahaan.

*Agency theory* mengimplikasikan adanya asimetris informasi antara manajer (*agent*) dengan pemilik (*principal*). Asimetris informasi merupakan suatu keadaan dimana agen (manajer) memiliki akses informasi yang lebih luas dibandingkan dengan *principal*. Kemungkinan *agent* tidak selalu berbuat sesuai dengan kepentingan dari pemilik saham sehingga menimbulkan terjadinya konflik kepentingan antara *agent* dan *principal* (Andini, *et al.*, 2020)

Teori keagenan dibangun sebagai upaya untuk memahami dan memecahkan masalah yang muncul ketika ada ketidak lengkapan informasi pada saat melakukan kontrak. Perencanaan kontrak yang tepat bertujuan untuk menyelaraskan kepentingan manajer dan pemilik dalam hal konflik kepentingan, hal ini merupakan inti dari teori keagenan. Peneliti menggunakan teori agensi ini karena peneliti akan melakukan studi empiris untuk menganalisis faktor faktor yang mempengaruhi manajemen laba pada

perusahaan retail. Khususnya menganalisis mengenai pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, *leverage* dan *mekanisme good corporate governance* serta komite audit perusahaan terhadap manajemen laba di perusahaan retail.

### 2.1.2 Manajemen Laba

Suheny (2020) Manajemen laba didefinisikan sebagai tindakan manajer mengatur laba sesuai dengan keinginannya, tindakan oportunistik tersebut dilakukan dengan cara memilih kebijakan akuntansi tertentu, sehingga laba perusahaan dapat diatur. Manajemen laba mengacu pada pendekatan yang dilakukan oleh manajer untuk memberikan pengaruh terhadap informasi yang terdapat pada laporan keuangan sehingga para pemangku kepentingan tidak mengetahui keadaan sebenarnya kinerja perusahaan (Wijoyo, 2020). Manajemen laba berfungsi sebagai memantau laporan laba/rugi secara *continue* baik secara mingguan, bulan, triwulan atau tahunan. Mengkombinasikan pemantauan laporan laba/rugi dengan pengeluaran kas, manajemen laba efektif akan menunjukkan seperti apa perusahaan berupaya menghemat waktu keuangan, meningkatkan uang tunai serta menghindari kehancuran finansial. Dengan mengkombinasikannya dengan laporan laba/rugi, maka bisa membantu suatu bisnis untuk melakukan penghematan dalam masa-masa sulit. Fungsi manajemen laba yang lain adalah Tim *Outsource* untuk manajemen laba, terkadang ada perusahaan yang cukup yang cukup rumit birokrasinya, sehingga bisa menghambat proyeksi. Dalam kondisi ini, bersinergi dengan

mitra solusi keuangan dan akuntansi bisa menghasilkan laporan yang ketat dari berbagai sudut pandang.

Manajemen laba merupakan rekayasa pelaporan keuangan dalam batas-batas tertentu yang tidak melanggar standar pelaporan keuangan. Hal ini dilakukan oleh manajemen dengan memanfaatkan wewenangnya dalam memilih metode akuntansi yang diizinkan oleh standar. Manajemen banyak memanfaatkan standar pelaporan keuangan dengan cara menerapkan standar yang dipercepat pengadopsiannya. Selain itu standar juga dijadikan sebagai alat untuk melaporkan kondisi perusahaan. *Fleksibilitas* yang terdapat dalam standar akuntansi pada akhirnya menyebabkan tindakan tersebut sah dengan sendirinya.

Manajemen laba dilakukan dengan memanipulasi besaran laba yang dilaporkan kepada para pemegang saham yang nantinya dapat mempengaruhi hasil perjanjian yang tergantung pada angka-angka akuntansi yang dilaporkan. Menurut Sulistyanto (2008) dan Sanjaya (2008), manajemen laba dilakukan dengan beberapa motivasi sebagai berikut:

- 1) Motivasi Bonus. Adanya *asimetri* informasi mengenai keuangan perusahaan menyebabkan pihak manajemen dapat mengatur laba bersih untuk memaksimalkan bonus mereka.
- 2) Motivasi Kontraktual Lainnya. Semakin dekat suatu perusahaan ke pelanggan utang, manajemen akan cenderung memilih prosedur akuntansi yang dapat memindahkan laba periode mendatang ke periode berjalan, yang bertujuan untuk mengurangi kemungkinan

perusahaan mengalami *technical default* (kegagalan dalam pelunasan utang).

- 3) Motivasi Politik. Perusahaan besar dan industri yang strategis akan menjadi perusahaan monopoli. Dalam hal demikian, perusahaan ini akan menggunakan manajemen laba untuk meningkatkan visibilitasnya dengan cara menggunakan prosedur akuntansi untuk menurunkan laba yang diperoleh.
- 4) Motivasi Pajak. Manajer termotivasi untuk melakukan manajemen laba karena pajak penghasilan. Praktik manajemen laba dilakukan untuk menurunkan pajak penghasilan.
- 5) Perpindahan CEO. Hipotesis rencana bonus menyatakan bahwa manajemen yang akan diganti akan melakukan manajemen laba untuk memaksimalkan bonus yang akan diperolehnya.
- 6) Motivasi Pasar Modal. Motivasi pasar modal muncul karena informasi akuntansi digunakan secara luas oleh para investor dan analis untuk menilai saham. Dalam hal demikian, kondisi ini dapat kesempatan bagi manajer untuk memanipulasi earnings dengan cara mempengaruhi harga saham jangka pendek.

Motivasi-motivasi yang telah disebutkan tersebut mendorong terbentuknya perilaku oportunistik dalam hubungan kontrak antara pihak-pihak yang terlibat baik antara pemegang saham dan manajer maupun antara pengelola perusahaan dan pihak lainnya. menurut Sulistyanto (2008) terdapat tiga pola dalam manajemen laba, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pola penaikkan laba (*income increasing*)

Pola menaikkan laba (*income increasing*) merupakan upaya perusahaan mengatur agar laba periode berjalan menjadi lebih tinggi daripada laba sesungguhnya. Upaya ini dilakukan dengan memperlakukan pendapatan periode berjalan menjadi lebih tinggi daripada pendapatan sesungguhnya dan atau biaya periode berjalan menjadi lebih rendah dari biaya sesungguhnya

2) Pola penurunan laba (*income decreasing*)

Pola penurunan laba (*income decreasing*) merupakan upaya perusahaan mengatur agar laba periode berjalan menjadi lebih rendah daripada laba sesungguhnya. Upaya ini dilakukan dengan memperlakukan pendapatan periode berjalan menjadi lebih rendah daripada pendapatan sesungguhnya dan atau biaya periode berjalan menjadi lebih tinggi dari biaya sesungguhnya

3) Pola perataan laba (*income smoothing*)

Pola perataan laba (*income smoothing*) merupakan upaya perusahaan mengatur agar labanya relatif sama selama beberapa periode. Upaya ini dilakukan dengan memperlakukan pendapatan dan biaya periode berjalan menjadi lebih tinggi atau lebih rendah daripada pendapatan atau biaya sesungguhnya.

### 2.1.3 Ukuran Perusahaan

Perbandingan yang digunakan untuk menunjukkan besar kecilnya perusahaan melalui total aset, penjualan bersih, dan kapitalisasi pasar adalah definisi dari ukuran perusahaan (Herlin Tunjung, 2019). Pengelompokan perusahaan atas dasar skala operasi (besar dan operasi) dapat diketahui oleh

*investor* sebagai salah satu *variable* dalam menentukan keputusan. Ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar kecilnya perusahaan menurut berbagai cara antara lain dengan ukuran pendapatan, total *asset* dan total modal. Menurut Lidiawati (2022) jika dibandingkan dengan perusahaan yang berukuran besar, perusahaan kecil memiliki basis pemegang kepentingan yang lebih sempit, sehingga bermacam kebijakan perusahaan kecil akan tidak terlalu terasa dampaknya bagi kepentingan publik

Perusahaan yang lebih besar umumnya akan mendapatkan lebih banyak perhatian dari pihak *eksternal*, seperti *investor*, *analisis*, maupun pemerintah. Oleh sebab itu perusahaan akan menghindari kenaikan laba yang terlalu drastis, hal ini akan menyebabkan penambahan kewajiban seperti pajak. Perusahaan besar akan cenderung berusaha untuk melaporkan perolehan laba yang stabil tiap tahunnya.

Berdasarkan dari definisi tersebut maka ukuran perusahaan dinilai dapat berpengaruh positif terhadap manajemen laba, karena semakin tinggi ukuran perusahaan maka akan semakin tinggi kemungkinan perusahaan melakukan manajemen laba. Hal ini sejalan dengan penelitian Agustina, dkk. (2018) dan Lidiawati (2022) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen laba. Berpengaruhnya umur perusahaan terjadi karena semakin besar ukuran perusahaan maka semakin besar kesempatan untuk melakukan manajemen laba.

#### 2.1.4 *Leverage*

Sakdiyah (2020) mendefinisikan *leverage* sebagai jumlah utang yang digunakan untuk membiayai/membeli asset-aset perusahaan dalam rangka melakukan kegiatan operasionalnya. Suatu perusahaan dengan utang yang lebih besar dari *equity* disebut sebagai perusahaan dengan tingkat *leverage* yang tinggi. Sedangkan menurut Lidiawati (2022) *leverage* adalah suatu rasio yang menggambarkan hubungan perbandingan antara total utang perusahaan dengan total asset, dimana rasio tersebut dapat melihat seberapa jauh perusahaan dibiayai oleh utang atau pihak luar.

Sari dan Susilowati (2022) mengartikan *leverage* sebagai rasio untuk menentukan seberapa sering suatu perusahaan menggunakan pinjaman jangka pendek. Hutang memiliki potensi untuk meningkatkan manajemen laba ketika perusahaan ingin meminilkan kemungkinan pelanggaran perjanjian kontrak hutang dan dan meningkatkan posisi selama proses negosiasi masa hutang. Berdasarkan dari definisi tersebut maka *leverage* dinilai dapat berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Perusahaan yang memiliki rasio *leverage* yang tinggi berarti memiliki proporsi utang yang lebih besar dibandingkan dengan proporsi aktiva yang dimiliki sehingga akan cenderung melakukan manipulasi dalam bentuk manajemen laba untuk menghindari perjanjian utang. Semakin tinggi tingkat rasio *leverage* suatu perusahaan akan berdampak pada semakin tinggi pula resiko yang akan dihadapi perusahaan, hal itu akan memicu perusahaan untuk meningkatkan laba. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fathihani, dkk (2022), Angelita, *et al.* (2023) dan Agustina, *et al.*, (2018) yang menyatakan

bahwa semakin besar rasio *leverage*, berarti semakin tinggi nilai utang perusahaan. Perusahaan yang mempunyai rasio *leverage* tinggi akibat besarnya jumlah utang dibandingkan dengan aktiva yang dimiliki perusahaan, diduga akan melakukan praktek manajemen laba karena perusahaan terancam *default* yaitu tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran utang pada waktunya.

### 2.1.5 Profitabilitas

Menurut Kasmir (2019:196) profitabilitas adalah rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan atau laba dalam suatu periode tertentu. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektifitas manajemen suatu perusahaan yang ditunjukkan dari laba yang dihasilkan dari penjualan atau dari pendanaan investasi. Profitabilitas dapat diukur dengan mengevaluasi tingkat pengembalian investasi perusahaan dalam mengolah keseluruhan assetnya atau uang yang diperoleh dari pemilik modal. Rasio ini dibagi menjadi dua jenis tergantung investasinya, yaitu *return on assets* dan *return on equity* menurut Darminto (2019 : 73). Semakin baik atau tinggi nilai dari rasio profitabilitas, maka akan semakin baik pula kemampuan perusahaan dalam mendapatkan keuntungan.

Berdasarkan definisi tersebut maka profitabilitas dinilai dapat berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Keterkaitan profitabilitas dengan manajemen laba adalah ketika profitabilitas yang diperoleh perusahaan tinggi pada periode waktu tertentu akan memicu perusahaan untuk melakukan manajemen laba dengan cara mengurangi tingkat pajak. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Sakdiyah (2020) dan Angelita, *et al.*,

(2023) yang menyatakan semakin tinggi profitabilitas yang dihasilkan perusahaan maka hal akan berpengaruh terhadap penerapan manajemen laba.

#### 2.1.6 *Good Corporate Governance*

*Corporate governance* merupakan salah satu elemen kunci dalam meningkatkan efisiensi ekonomi, yang meliputi serangkaian hubungan antara manajemen perusahaan, dewan komisaris, para pemegang saham dan *stakeholders* lainnya yang juga memberikan suatu struktur yang memfasilitasi penentuan sasaran-sasaran dari suatu perusahaan dan sebagai sarana untuk menentukan teknik monitoring kerja

Arlita, *et al.*, (2020) mengartikan *Corporate governance* sebagai seperangkat mekanisme yang digunakan untuk memitigasi yang muncul akibat masalah keagenan. Dengan informasi yang tersedia, *agent* dapat mengambil keputusan yang hanya menguntungkan diri sendiri dan mengorbankan kepentingan *principal*. Hal ini mungkin terjadi akibat pengelola mempunyai informasi tentang perusahaan yang tidak dimiliki oleh pemilik perusahaan (*asymmetric information*)

*good corporate governance* didefinisikan sebagai system, proses, struktur, dan mekanisme yang mengatur pola hubungan yang baik antara perusahaan dan pemangku kepentingan untuk mencapai kinerja perusahaan semaksimal mungkin dengan cara yang tidak merugikan pemangku kepentingan (Asyati dan Farida, 2020). Mekanisme *good corporate governance* yang berjalan dengan efektif dan efisien, akan menjadikan seluruh proses aktivitas perusahaan akan berjalan baik,

sehingga hal-hal yang berkaitan dengan kinerja perusahaan baik yang sifatnya kinerja finansial maupun non finansial akan juga turut membaik. Prinsip-prinsip *corporate governance* yang dikemukakan oleh Kelvianto, *et al.*, (2018) yaitu :

- 1) Memastikan dasar bagi kerangka *corporate governance* yang efektif (*Ensuring The Basis For an Effective Corporate Governace Framewrok*). Kerangka *corporate governace* harus meningkatkan pasar yang transparan dan efisien, konsisten dengan aturan hukum dan secara jelas mengartikulasikan pembagian kewajiban antara pengawas, regulator dan otoritas pelaksanaan yang berbeda.
- 2) Hak-hak pemegang saham dan fungsi kepemilikan kunci (*The Right Of Shareholders and Key Ownership Functions*). Kerangka *corporate governance* harus melindungi dan memfasilitasi penggunaan hak-hak pemegang saham.
- 3) Persamaan perlakuan bagi pemegang saham (*The Equitable Treatment of Shareholders*). Kerangka *corporate governance* harus memastikan persamaan perlakuan bagi seluruh pemegang saham, termasuk pemegang saham, minoritas dan asing. Semua pemegang saham harus memiliki kesempatan untuk memperoleh penggantian kembali secara efektif atas pelanggaran hak-hak mereka.
- 4) Peran *stakeholder* dalam *corporate governance* (*The Role of Stakeholder in Corporate Governance*). Kerangka *corporate governance* harus mengakui hak-hak *stakeholder* yang ditetapkan oleh hukum atau melalui mutual agreement dan mendorong kerjasama

aktif antara *corporate dan stakeholder* dalam menciptakan kemakmuran, pekerjaan dan perusahaan yang memiliki *sustainable*.

5) Pengungkapan dan transparansi (*Disclosure and Transparency*).

Kerangka *corporate governance* harus memastikan bahwa pengungkapan yang tepat waktu akan akurat telah dibuat atas semua hal yang material menyangkut korporat, termasuk situasi keuangan, kinerja, kepemilikan dan pengelolaan perusahaan.

6) Kewajiban dewan (*The Responsibilities of the Board*). Kerangka *corporate governance* harus memastikan bahwa pedoman strategis perusahaan, pengawasan yang efektif terhadap manajemen oleh dewan, dan akuntabilitas dewan kepada perusahaan dan pemegang saham.

Prinsip-prinsip dasar *good corporate governance* ini di harapkan dapat dijadikan titik acuan bagi para pemerintah dalam membangun *framework* bagi penerapan *good corporate governance*. Pedoman *good corporate governance* merupakan panduan bagi perusahaan dalam membangun, melaksanakan dan mengkomunikasikan Pratik *good corporate governance* kepada pemangku kepentingan. Dalam pedoman tersebut KNKG (Komite Nasional Kebijakan *Governance*) memaparkan asas-asas *good corporate governance* sebagai berikut :

1) Transparansi (*Transparancy*)

Untuk menjaga *objektivitas* dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan.

Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang diisyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.

#### 2) Akuntabilitas (*Accountability*)

Harus dapat mempertanggungjawabkan kinerja secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan persyaratan yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

#### 3) Responabilitas (*Responsibility*)

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.

#### 4) Independensi (*Independency*)

Untuk melancarkan pelaksanaan asas *good corporate governance*, perusahaan harus dikelola secara *independent* sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

### 5) Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*)

Melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

Menurut Asyati dan Farida (2020) Ada beberapa komponen yang digunakan dalam mekanisme *corporate governance* yang terdiri dari ukuran dewan komisaris, dewan komisaris independen, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional dan komite audit. Dalam penelitian ini untuk mengetahui pengaruhnya mekanisme *good corporate governance* terhadap manajemen laba, menggunakan komponen diantaranya adalah :

#### 1) **Kepemilikan Manajerial**

Kepemilikan manajerial adalah saham yang dimiliki oleh manajemen perusahaan secara pribadi maupun saham yang dimiliki oleh anak cabang perusahaan yang bersangkutan beserta afiliasinya. Tingginya kepemilikan manajerial, maka pihak manajemen langsung dapat merasakan dari keputusan yang diambil sehingga ada tanggung jawab yang lebih besar dalam mengelola perusahaan dan menyajikan laporan keuangan sesuai dengan informasi yang benar adanya dan dapat meminimalisir adanya manajemen laba. (Violinna, *et al.*, 2022)

Penyetrakan kepentingan pemegang saham dengan kepentingan manajer dapat diatasi dengan kepemilikan saham oleh manajemen perusahaan, sehingga konflik kepentingan antara pemegang saham

dan manajer dapat dikurangi (Arlita, *et al.*, 2020) Secara teoritis ketika kepemilikan saham oleh manajerial tinggi maka kemungkinan terjadinya perilaku *opportunistic* manajer (manajemen laba) akan menurun. Selain itu dengan adanya kepemilikan saham oleh manajer akan memperkecil masalah *agency*, karena manajer secara langsung merasakan semua keuntungan ataupun kerugian dari manfaat keputusan yang mereka tentukan, karena secara langsung menjadi pemilik perusahaan melalui kepemilikan jumlah lembar saham mereka pada perusahaan

## 2) Dewan Komisaris Independen

Komisaris independen adalah pihak yang bertanggungjawab dalam mempekerjakan, mengevaluasi, dan memecat para manajer puncak, mendapat kepercayaan dalam kunci pengambilan keputusan operasi dan finansial perusahaan, memberikan nasihat kepada pihak manajemen dan menjaga para pemegang saham untuk selalu mendapat informasi tentang kondisi perusahaan. Melalui peran dewan komisaris dalam melakukan fungsi sebagai pemisah kepentingan antara pemegang saham dan pihak manajemen, komposisi dewan komisaris bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada dewan direksi serta dapat memberikan kontribusi yang efektif terhadap hasil dari proses penyusunan laporan keuangan yang berkualitas atau kemungkinan terhindar dari kecurangan laporan keuangan (Arlita, *et al.*, 2020)

Anggota dari komisaris independen tidak berasal dari dewan komisaris, dewan direksi ataupun para pemegang saham yang kuat. Karena komisaris independen berfungsi sebagai pemisah kepentingan antara pemegang saham dan manajemen. Komisaris independen merupakan posisi terbaik untuk melakukan fungsi monitoring agar terciptanya perusahaan *good corporate governance*. Tugas komisaris independen yaitu memastikan prinsip-prinsip dan praktik *good corporate governance* dipatuhi dan diterapkan dengan baik. Namun dewan komisaris tidak boleh turut serta dalam mengambil keputusan operasional. Kedudukan masing-masing anggota dewan komisaris termasuk komisaris utama adalah setara.

### 3) Kepemilikan Institusional

Proporsi saham yang dimiliki oleh pihak institusi atau lembaga tertentu seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lainnya merupakan definisi dari kepemilikan saham (Felicya, *et al.*, 2020). Pemegang saham institusional adalah pemegang saham perusahaan oleh pemerintah, institusi keuangan, institusi badan hukum, institusi luar negeri, dana perwalian dan institusi lainnya.

Keberadaan investor institusional dianggap mampu menjadi mekanisme monitoring yang efektif dalam setiap keputusan yang diambil oleh manajer. Hal ini disebabkan investor institusional terlibat dalam pengambilan keputusan yang strategis sehingga tidak mudah percaya terhadap tindakan manipulasi laba. Tingkat

kepemilikan yang tinggi oleh institusi dalam suatu perusahaan akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal, semakin tinggi kepemilikan saham investor institusional sering dikatakan *sophisticated* sehingga akan menyebabkan semakin rendah perilaku oportunistik manajer untuk melakukan manajemen laba Suheny (2020)

Terjadinya manajemen laba dikarenakan adanya persoalan teori keagenan sebagai akibat dari pemisah kepemilikan dengan manajemen perusahaan, problem tersebut dapat dipengaruhi oleh struktur kepemilikan manajerial dan struktur kepemilikan institusional. Kepemilikan saham yang lebih terkonsentrasi kepada institusi akan membuat institusi tersebut menjadi pemegang saham mayoritas sehingga memiliki hak control dan hak aliran kas. Hak kontrol ini membuat pemegang saham institusi mampu mengontrol serta mengawasi tindakan manajemen dan hak aliran kas membuat institusi menginginkan manajer menjalankan secara benar.

### 2.1.7 Komite Audit

Menurut Lidiawati (2022), Komite audit adalah komite yang dibentuk dalam rangka peningkatan kualitas laporan keuangan dan peningkatan efektivitas audit eksternal dan internal oleh dewan komisaris. Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) menegaskan keberadaan komite audit diharapkan mampu meningkatkan kualitas pengawasan internal perusahaan, serta mampu mengoptimalkan mekanisme *checks and balances*, yang pada

akhirnya ditujukan untuk memberikan perlindungan yang optimum kepada para pemegang saham dan *stakeholder* lainnya. (Suheny, 2020:32)

Tugas komite audit meliputi menelaah kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh perusahaan, menilai pengendalian internal, menelaah *system* pelaporan eksternal dan kepatuhan terhadap peraturan. Adanya komunikasi formal antara komite audit, auditor internal dan auditor eksternal akan menjamin proses audit internal dan audit eksternal berjalan dengan baik.

Untuk dapat meningkatkan kualitas pengawasan internal perusahaan serta memaksimalkan proses pengecekan laporan keuangan sehingga dapat melindungi saham pemilik dan *stakeholder* kehadiran komite audit dalam suatu perusahaan diharapkan dapat berkontribusi dalam menjaga perusahaan agar lebih baik melalui peninjauan informasi keuangan. (Sari, *et al.*, 2022). Semakin tinggi presentase anggota independent maka semakin kecil manajemen laba yang dilakukan perusahaan.

## 2.2. Hasil Penelitian Sebelumnya

Penelitian mengenai pengaruh ukuran perusahaan, *leverage*, profitabilitas, *mekanisme good corporate governance* dan komite audit terhadap manajemen laba telah banyak dilakukan oleh beberapa peneliti diantaranya dilakukan oleh :

Agustina, *at al.* (2018) meneliti pengaruh ukuran perusahaan, umur perusahaan, *leverage* dan profitabilitas terhadap manajemen laba pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di bursa efek Indonesia periode

2014-2016. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari laporan keuangan. Populasi dalam penelitian adalah sektor Industri Pertambangan yang terdaftar di BEI. Teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu *purposive sampling* dan diperoleh 17 perusahaan dengan periode penelitian 2014-2016. Dengan menunjukkan hasil bahwa secara bersama-sama ukuran perusahaan, umur perusahaan dan *leverage* berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen laba sedangkan profitabilitas tidak berpengaruh signifikan atau berpengaruh negative terhadap manajemen laba.

Lidiawati (2022) meneliti pengaruh kualitas audit, komite audit, kepemilikan institusional, ukuran perusahaan terhadap manajemen laba. Populasi dalam penelitian adalah perusahaan *property and real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2011 sampai 2014. Total sampel penelitian ada 25 perusahaan *property and real estate* yang ditentukan melalui *purposive sampling*. Dengan menunjukkan hasil bahwa kualitas audit tidak berpengaruh terhadap manajemen laba, artinya perusahaan-perusahaan tidak terlalu memperhatikan KAP yang akan mengaudit perusahaan. Komite audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba, artinya semakin besar komite audit maka dapat memperkecil tindakan praktik manajemen laba. Kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap manajemen laba, artinya persentase kepemilikan institusional yang kecil tidak dapat berpengaruh terhadap manajemen laba. Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap manajemen laba, artinya perusahaan besar mempunyai dorongan yang lebih besar melakukan tindakan manajemen laba. *Leverage* tidak berpengaruh

terhadap manajemen laba, artinya perusahaan memiliki *leverage* yang aman.

Arlita, *et al.*, (2020) meneliti pengaruh *good corporate governance* dan *leverage* terhadap praktik manajemen laba. Populasi pada penelitian adalah seluruh perusahaan industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI periode 2013-2016. Sampel pada penelitian sebanyak 9 perusahaan industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI pada tahun 2013-2016 dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Dengan menunjukkan hasil bahwa kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan proporsi dewan komisaris independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen laba, sedangkan *leverage* berpengaruh negative dan signifikan terhadap manajemen laba.

Hardiyanti, *et al.*, (2022) meneliti analisis profitabilitas, ukuran perusahaan, *leverage*, dan pengaruhnya terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur. Populasi dalam penelitian adalah semua perusahaan manufaktur yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2018-2020 sebanyak 155 perusahaan. Penentuan sampel dari penelitian menggunakan Teknik *purposive sampling* dengan banyak sampel sejumlah 30 perusahaan. Dengan menunjukkan hasil bahwa profitabilitas signifikan negative terhadap manajemen laba, ukuran perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap manajemen laba, dan *leverage* tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap manajemen laba.

Asyati, dkk. (2020) meneliti pengaruh *good corporate governance*, *leverage*, profitabilitas, dan kualitas audit terhadap praktik manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2014-2018. Populasi dari penelitian adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014-2018 dengan sampel total sampel sebanyak 18 perusahaan manufaktur yang dipilih melalui teknik *purposive sampling*. Menunjukkan hasil bahwa variabel *good corporate governance* yang terdiri dari dewan komisaris independen, komite audit dan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap manajemen laba, sedangkan dewan komisaris dan kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap praktik manajemen laba. *Leverage* tidak berpengaruh terhadap manajemen laba, profitabilitas yang diukur dengan ROA memiliki efek positif dan kualitas audit tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.

Sari, *at al.*, (2022) meneliti pengaruh *leverage*, ukuran perusahaan, profitabilitas, kualitas audit dan komite audit terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2015-2018. Populasi dari penelitian adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015- 2018. Dengan 295 perusahaan manufaktur sebagai sampel yang diambil berdasarkan metode *purposive sampling*. Menunjukkan hasil bahwa *leverage* dan komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen laba, sedangkan ukuran perusahaan, profitabilitas dan kualitas audit tidak berpengaruh terhadap manajemen laba

Suheny, (2020) meneliti pengaruh *corporate governance*, ukuran perusahaan, *leverage*, dan kualitas audit terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur milik kelompok LQ45 yang terdaftar di BEI selama 2012-2017. Populasi penelitian adalah seluruh perusahaan manufaktur milik kelompok LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang menerbitkan laporan keuangan selama periode 2012-2016. Diperoleh 48 perusahaan sebagai sampel pada penelitian dengan menggunakan teknik *purposive sampling* untuk menentukan sampel. Menunjukkan hasil bahwa *corporate governance* yang diproksikan dengan kepemilikan manajerial, ukuran dewan, komposisi dewan, komite audit, tidak berpengaruh untuk manajemen laba sedangkan proksi kepemilikan institusional berpengaruh terhadap manajemen laba, ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap manajemen laba, *leverage* berpengaruh positif terhadap manajemen laba, sementara kualitas audit yang di proksi dalam KAP BIG 4 dan NON KAP BIG 4 berpengaruh negative terhadap manajemen laba.